

Perjanjian baku pengalihan tanggung jawab dalam pasal 36 ayat 2 perda DKI No.5 tahun 1999 tentang perparkiran dan pasal 18 ayat 1a undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau dari teori-teori hukum perjanjian dan putusan pengadilan

Lumban Tobing, David M., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=89012&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Perjanjian Baku pengalihan tanggung jawab dalam permasalahan perparkiran sudah menjadi hal umum dan juga mendapatkan legalitas dari Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Mengingat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal tersebut termasuk yang dilarang dan telah dinyatakan batal demi hukum maka penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab pengelola parkir.

Metode penelitian dilakukan dengan meninjau dasar hukum perjanjian baku dari segi teori - teori hukum perjanjian dan putusan-putusan pengadilan dan hasilnya adalah perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tidak dibenarkan oleh hukum positif kecuali didasarkan perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan apabila tidak demikian resiko hilangnya mobil ditanggung oleh pengelola parkir. Asuransi parkir-parkiran oleh pengelola parkir menjadi jalan keluar terbaik bagi terciptanya keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pengelola parkir dan pemakai jasa parkir.